

MALL, MASYARAKAT YOGYA DAN BUDAYA KONSUMSI

M. Imam Zamroni

Abstrak

kehadiran *Shopping Mall* sebagai representasi ekonomi kapitalis mampu mendorong terciptanya perubahan sosial, seperti merebaknya budaya konsumerisme, perubahan perilaku sosial, mode berpakaian dan gaya hidup. Terutama di kalangan usia muda, di mana budaya pop (*pop culture*) menjadi *trand* yang berkiblat pada Barat. Di samping itu juga terdapat kemudahan-kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik material maupun non material. Faktor kebutuhan rekreatif mampu menjadi dasar bagi hasrat untuk berbelanja di *Shopping Mall*. Oleh karenanya, mengkonsumsi barang tidak hanya didasarkan pada logika kebutuhan semata, akan tetapi juga ranah emosi seseorang. Situasi tersebut secara sistematis menggeser nilai-nilai tradisi sebagai identitas dalam percaturan global. Berawal dari situlah maka, upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya budaya konsumtif dalam masyarakat tidak bisa ditawar lagi. Selama ini kita telah salah kaprah dalam memaknai modernitas yang berkiblat pada Barat, namun hanya sebatas simbol-simbol saja, sedangkan dari sisi substantif masih jauh dari harapan. Akhirnya simbolisme-simbolisme tersebut menjadi belenggu bagi kehidupan sosial.

I. Pendahuluan

Kehadiran *Carrefour*, *Saphir Square*, *Malioboro Mal*, *Ramai Mal*, *Galleria mal* atau biasa disebut dengan *Shopping Mall* di Yogyakarta sejak beberapa tahun terakhir, telah “menggugah ketentraman” masyarakat secara keseluruhan. Tua-muda, besar-kecil, kaya maupun miskin, hampir bisa dipastikan merempatkan untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya, meski terkadang kondisi perekonomian mereka sedang tidak menentu, tetap saja memaksakan untuk berkunjung kepada makhluk

megah yang disebut mal dan merupakan simbol dari kedigadayaan kapitalisme.

Saat itu juga mereka telah terjangkiti dengan virus budaya konsumtif dan terus akan mengakar kuat dalam diri seseorang. Iklan menjadi senjata yang paling ampuh untuk memasukkan virus konsumerisme dalam masyarakat. Ironisnya, ada yang sadar dan ada yang tidak, bahwa virus tersebut secara perlahan menghinggapinya. Secara sosiologis, kehadiran mal juga membawa dampak yang amat serius bagi masyarakat Yogyakarta yang dahulu selalu memegang teguh nilai-nilai tradisi budaya Jawa.¹ Akan tetapi kondisi sosial ekonomi masyarakat tetap saja memprihatinkan. Sebagai buktinya, pengangguran di Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.²

Perdebatan tentang eksistensi Yogyakarta yang sarat akan nilai-nilai budaya dan tradisi terus menghangat diberbagai kalangan, seiring dengan semakin menggejalanya proses kapitalisasi aset-aset budaya yang dilakukan oleh para elite akibat nalar bisnis yang "kebablasan". Masyarakat terus didorong untuk merubah gaya hidup (*life style*) dengan cepat, seperti tingkat konsumsi, mode berpakaian, perilaku sosial, pergaulan sosial dan hasrat untuk terus untuk terus mengikuti produk-produk baru yang diproduksi secara cepat. Singkatnya modernitas mampu merubah segala aspek sosial dan di sinilah identitas masyarakat lokal mulai tergerus. Mereka didorong untuk terus belajar "mengonsumsi" barang-barang baru dengan menghadirkan mal sebagai representasi kapitalisme. Maka, tak heran bila mereka juga akan berkompetisi dalam mengonsumsi tanda,³ dengan

¹ Masyarakat Jawa selalu memegang teguh landasan dan filosofi orang Jawa yang mengedepankan keselarasan sosial dan mempunyai solidaritas sosial yang tinggi, (Lihat, Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa; Sebuah Analisa falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003) P. 39. Bandingkan, Benedict R.O'G. Anderson, 1990, *Language and Power; Exploring Political Cultures in Indonesia*, (Cornell University Press.)

² Sampai dengan akhir Mei 2007, jumlah pengangguran mencapai 50.390 orang. Adapun jumlah pengangguran di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berturut-turut seam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2004 mencapai 91.400 orang, tahun 2005 berjumlah 92.718 orang dan pada tahun 2007 jumlah pengangguran mencapai 94.748 orang. Terlihat angka pengangguran terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir (Kompas Jogja, 15/06/2007).

³ Baudrillard (1976/1993:9), mengupas kapitalisme modern sebagai "rumah border capital, yang digeneralisasikan, rumah bordil bukan untuk pelacuran, tetapi untuk substitusi dan komunikasi". Buruh tidak lagi sebuah kekuasaan tetapi sama sekali sebuah tanda diantara

berbelanja secara besar-besaran, bahkan barang yang kurang dibutuhkan sekaligus juga dibeli. Pada level ini, proses konsumsi lebih didorong oleh logika hasrat (*desire*) dan keinginan (*want*) ketimbang logika kebutuhan (*need*) yang sebenarnya didasarkan pada kalkulasi empirik atas kebutuhan hidup sehari-hari.

Di samping itu, mal yang katanya akan memberikan “ruang” bagi produk lokal dengan kapasitas tertentu jumlahnya juga sangat minimal. Jika mengamati secara jeli masa-masa promosi di media masa, usaha untuk menampilkan produk lokal yang berjumlah 20% tersebut tidak ditemui, dan hanya produk-produk asing yang tampak dalam promosinya. Lalu bagaimana nasib produk lokal yang hanya disisakan tempat sebesar 20%, namun dalam prakteknya terus menerus mengalami proses marginalisasi? Ini merupakan ekspansi hubungan dagang serta formasi wilayah pasar terpadu (*the formation of integrated market areas*). Proses perluasan pasar di seluruh wilayah penjuru dunia tersebut merupakan sebuah rekayasa sosial dalam skala luas.⁴ Dan tentunya akan membawa dampak bagi perubahan sosial (*social change*) masyarakat yang melingkupinya, karena perubahan sosial selalu mempunyai relasi dengan aspek sosial lain dalam masyarakat⁵ seperti meningkatnya budaya konsumerisme dan perubahan perilaku sosial, bahkan menggeser tradisi masyarakat lokal.

Situasi tersebut merupakan sebagian kecil bagi sejumlah kota-kota besar yang ada di Indonesia.⁶ Di mana, mal-mal besar terus “mengebiri” eksistensi pasar tradisional yang sudah lama eksis dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat kecil. Singkatnya modernisasi perekonomian juga menyisakan sejumlah persoalan-persoalan sosial yang membutuhkan kekuasaan negara sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam konteks inilah, tesis Boeke (1953), tentang dualisme ekonomi runtuh akibat perkembangan kapitalisme global. Memang setiap

sekian banyak tanda. Buruh tidak lagi produktif, tetapi hanya reproduksi (tanda atau kode). Konsumen dapat dipandang sebagai buruh-buruh dan oleh sebab itu, shopping Mallbisa dipahami sebagai pabrik-pabrik. (Lihat, Jean Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*, (Yogyakarta, Kreasi wacana, 2004) P. 84

⁴ Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001) P. 4.

⁵ Piötr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta, Prenada, 2005) P. 6

⁶ Sebagai perbandingan, di Jakarta menurut data Biro Perekonomian DKI (2004) pusat perbelanjaan di Jakarta hingga kini sudah mencapai 449 buah. Jumlah itu terdiri atas 152 mal, 126 toserba, 9 pusat grosir, 11 *hypermarket* dan 151 pasar tradisional ([Http://urbanpoor.or.id](http://urbanpoor.or.id)).

sistem teori ekonomi harus berpijak pada tata ekonominya sendiri agar bisa dipakai yang bersangkutan dan berjalan secara diametral antara yang satu dengan yang lain.⁷ Namun dalam praksisnya, dua sistem tersebut saling "berebut ruang" yang mengakibatkan termarginalkannya ekonomi tradisional. Bahkan lebih dari itu, kekuatan pasar juga terus melakukan ekspansi dan mereduksi kekuatan negara.

Ironisnya, pemerintah setempat tidak memberikan ruang yang seimbang untuk saling berkembang antara ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Perekonomian modern yang dikembangkan dengan sistem kapitalisme modern yang didukung oleh teknologi tinggi mampu menggaet konsumen di segala lapisan masyarakat. Singkatnya ekonomi kapitalis seperti layaknya pukat harimau yang menjaring seluruh ikan yang ada di laut. Oleh karenanya, ekonomi tradisional secara perlahan namun pasti akan ditinggalkan oleh konsumen dan digantikan dengan ekonomi kapitalis yang jauh dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Yogyakarta, seperti *andhap ashor*, *tetangga*, *sumeh*, *rukun*, saling menyapa, dan mempunyai solidaritas yang tinggi antar sesama.⁸ Di kalangan remaja, nilai-nilai kehidupan yang selalu mengedepankan kearifan lokal mulai tergeser oleh sikap hedonisme dan individualistik yang dianggapnya lebih modern karena berkaca pada barat, namun tercerabut dari akar dan khazanah tradisi budaya lokal.⁹

Pada sisi lain, pemberdayaan masyarakat dengan sistem perekomian-nya yang masih *genuin* luput dari agenda pemerintah dan lebih memilih untuk menghadirkan mal-mal yang berkapasitas besar yang hanya

⁷ J.H.Boeke, *Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda*, dalam Sajogyo, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, (Jakarta, yayasan Obor, 1982) P. 7

⁸ Lihat, Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa; Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003). P.38-69

⁹ Dalam hal ini Habermas melihat bahwa dalam kemajuan teknis semacam ini, tradisi-tradisi kebudayaan yang semula mengontrol tingkah laku sosial tidak lagi bisa begitu saja mendefinisikan pemahaman diri masyarakat modern (Lihat, F.Budi Hardiman, *Manuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, (Yogyakarta, Kanisius, 1993) P. 124. Berbagai istilah yang mempesona telah dikemukakan untuk menggambarkan masa transisi ini, beberapa diantaranya secara positif mengacu kepada kemunculan atau suatu sistem sosial baru, seperti "masyarakat informasi" atau "masyarakat konsumen", namun diantara mereka justru mengatakan bahwa sejumlah kondisi yang mendahului semakin mendekati akhir, 'pascamodernitas' atau 'pascakapitalisme' (Anthony Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005) P.2.

memberikan keuntungan segelintir orang saja, kelas pemodal. Secara teoritis, dampak bagi segelintir orang akan semakin sejahtera dan digdaya, sedangkan masyarakat kecil akan tetap stagnan dalam kondisi yang memprihatinkan. Hadirnya mal, meski mampu menyerap tenaga kerja, namun tak mampu merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat akar rumput secara signifikan. Terutama pasca gempa dan tsunami yang memporak-porandakan seluruh tatanan sosial ekonomi. Hal yang paling dirasakan adalah perubahan gaya hidup (*life stile*) terutama di kalangan para ABG (Anak Baru Gedhe) yang dihinggapai perilaku konsumtif. Meskipun kita hidup di negara yang tertinggal jauh dibandingkan dengan Cina, Jepang, maupun Amerika, namun dari segi gaya hidup maupun mode pakaian tidak kalah modern dengan masyarakat yang ada di negara-negara maju, bahkan mungkin sudah memasuki pola kehidupan gaya post modern.¹⁰ Mode pakaian dan perilaku sosial menjadi bukti nyata di kalangan para penikmat budaya konsumtifisme. Rupanya modernitas hanya dipahami sebatas pada permukaan atas (*surface structure*) sedangkan ruang dalam (*deep structure*) kosong bagai perut bedug.

Menurut pengamatan penulis, sejak tahun 2000an espektasi pemerintah Yogya terhadap predikat Kota Pendidikan mulai menurun. Ini terbukti dengan semakin maraknya pembangunan beberapa mal di Yogyakarta. Sedangkan pusat-pusat studi seperti perpustakaan Daerah, perpustakaan Hatta, museum Afandi, terlihat kurang mendapat perhatian, struktur bangunannya tidak menarik, buku-buku yang tersedia relatif sedikit dan didominasi literatur tua yang memuat teori-teori yang sudah usang dan sudah sangat mendesak untuk dilakukan peremajaan dengan menghadirkan buku-buku baru, sehingga mampu menumbuhkan minat baca di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Ini sekaligus mendorong munculnya temuan-temuan baru dalam dunia akademik untuk transformasi sosial.¹¹

¹⁰ Pada tahun 1987, para intelektual Jerman sudah menggunakan istilah postmodern, namun lebih dalam pengertian melecehkan. Terdapat perbedaan yang khas antara modernisme dan postmodernisme yang lebih berarti mendasar daripada yang lain. Di sini modernisme menafsirkan representasi sebagai yang bersifat problematis, sedangkan postmodernisme mempersoalkan realitas (lihat, Scott Lash, *Sosiologi Post Modernisme*, Yogyakarta, Kanisius, 2004) P.23

¹¹ Istilah tersebut oleh Mansour Fakih diartikan sebagai suatu proese perubahan oleh rakyat (Lihat, Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) P.61.

Ironisnya, pemerintah lebih berkonsentrasi pada upaya kapitalisasi aset-aset budaya dan mengesampingkan situs-situs bersejarah (*heritage*) peninggalan nenek moyang yang sangat berharga. Tak ayal, pola pembangunan yang bercirikan akumulasi kapital telah menggeser kearifan tradisi lokal. Yang lebih menyayat hati, percepatan dan ekspansi pembangunan ekonomi bermodal besar itu ternyata secara sistemik kian memarginalisasi ekonomi desa yang selama ini masih bergerak dalam lintasan informal dan tradisional.¹² Pasar tradisional yang diyakini mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan kualifikasi dan spesialisasi yang rendah, sebagaimana tingkat pendidikan bangsa Indonesia yang rendah, menuai ancaman keruntuhan, karena digeser secara sistemik oleh kekuatan pasar yang diamini oleh pemerintah setempat. Tulisan ini berusaha untuk memberikan deskripsi secara mendalam tentang semakin maraknya ekonomi kapitalis dan dampak perubahan sosial yang ditimbulkan pada masyarakat Yogyakarta, khususnya budaya konsumsi dan perilaku sosial

II. Budaya Pasar; Tradisional Vs Modern

Di balik perdebatan eksistensi *Shopping Mall* tersebut, sebenarnya terdapat hal luput dari perhatian publik, yaitu eksistensi pasar tradisional Catur Tunggal yang sudah lama berdiri dan berada tepat di belakang Carrefour. Tak ayal, sebelum Carrefour di bangun, hampir seluruh masyarakat sekitar Gowok melakukan transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional itu. Namun sekarang situasi sudah berubah secara drastis ketika mal tersebut mulai beroperasi. Pasar desa Catur Tunggal kelihatan sepi, terlebih jika hari-hari libur seperti hari minggu. Orang-orang lebih memilih belanja di Carrefour. Selain tempatnya lebih nyaman, bersih, tata letaknya dideasin secara elegan, barang-barang yang tersedia pun lebih lengkap, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai pakaian yang harganya jutaan rupiah.

Pendeknya, saat ini orang berbelanja tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisiologis semata, berupa kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi juga kebutuhan psikologis yang bersifat rekreatif. Hal itu tentunya membawa implikasi yang serius bagi perekonomian rakyat atau pasar tradisional yang sudah tidak mampu lagi memenuhi dua kebutuhan sekaligus kepada pengunjunnya. Pasar tradisional sebagai representasi budaya lokal, seharusnya tidak ditinggalkan, namun perlu mendapatkan

¹² Kompas Jogja, 04/04/2005.

sentuhan inovatif agar terus diminati oleh pengunjung. Dua sistem pasar tersebut memiliki karakter budaya yang berbeda dan saling berpegang teguh pada ideologi masing-masing. Tak ayal, terkadang juga memunculkan ketegangan cultural.

Ketertarikan masyarakat untuk membelanjakan uangnya *Shopping Mall* paling tidak terdapat empat hal yang melatarbelakanginya, jika dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. *Pertama*, selain dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari atau barang-barang yang mereka perlukan, mereka juga dapat berkreasi (*window shopping*). *Kedua*, diantara kedua sistem pasar tersebut, beberapa harga barang yang tersedia mempunyai selisih, meskipun secara kuantitatif jumlahnya sangat kecil. *Ketiga*, dalam benak masyarakat, belanja tidak hanya sekedar bagaimana memperoleh barang-barang yang diinginkan (*need*), faktor kepuasan dalam mengkonsumsi citra, tanda dan makna simbolik menjadi bagian penting dalam masyarakat konsumsi.¹³ *Keempat*, kenyamanan dalam melakukan transaksi dapat dirasakan di *Shopping Mall*, sebagai representasi sistem ekonomi kapitalis. Pada ranah ini, masyarakat terus digiring untuk membangkitkan naluri konsumtif dan dikondisikan untuk mengikuti arus produksi yang berkembang dengan cepat. Joseph E Stiglitz (2002), dalam bukunya, *Globalization and Its Discontents*, mengatakan, spirit kapitalisme global adalah logika kecepatan.¹⁴ Ironisnya, sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa, keuntungan dari transaksi yang dilakukan tersebut mengalir ke tangan pemilik modal yang notabene didominasi oleh orang Asing dari pada pemodal dari Indonesia.

Dalam prakteknya, sistem ekonomi kapitalistik mendorong sikap sikap individualistik, antara penjual dan pembeli selalu menjaga jarak dan tentunya tidak terbangun ikatan emosional yang kuat. Terjadi proses saling menyapa, namun hanya untuk kepentingan sesaat. Artinya lebih mengedepankan rasionalitas dalam transaksi jual beli dan tidak terbangun ikatan emosional, murni logika pasar yang digunakan dan mendorong orang-orang untuk konsumtif, terlebih jika sudah dilengkapi dengan fasilitas sosial lainnya, seperti *hot spot*, diskon besar-besaran atau undian berhadiah. Berbeda dengan situasi sosial yang dibangun dalam pasar tradisional lebih mengutamakan intensitas interaksi sosial dan bangunan emosional yang

¹³ Goerge Ritzer, *Teori Sosial Postmodernisme*, (Yogyakarta, Kreasi wacana, 2005) P. 157

¹⁴ Joseph E Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, (London, Penguin Books, 2002). P. 5.

kuat antara penjual dan pembeli.¹⁵ Bahkan lebih dari itu, terdapat kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam pelaku pasar tradisional.¹⁶ Begitu pula relasi sosial antar penjual tidak hanya berkompetisi dan saling melibas, namun terdapat hubungan *simbiosis mutualisme* (hubungan yang saling menguntungkan). Dengan menganut teori yang fungsionalisme struktural yang digagas oleh Talcott Persons.¹⁷ Nilai kerekatan sosial lebih diutamakan daripada spirit kompetisi seperti dalam ekonomi kapitalis.

Terkait dengan kondisi di atas, maka tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa marginalisasi perekonomian tradisional, secara implisit sedang gencar-gencarnya dijalankan oleh pemerintah provinsi DIY dengan menghadirkan *Shopping Mall* di beberapa pusat perkotaan. Perkembangan pasar modern dan industri pertokoan dengan gaya mewah tersebut dianggap oleh pemerintah dan kalangan swasta akan berdampak pada penciptaan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Secara teoritis hal tersebut dapat dibenarkan, namun tak bisa dipungkiri ketimpangan sosial (*social disorder*) terlihat sangat tajam. Di sinilah seharusnya para pengambil kebijakan pembangunan harus memiliki kearifan akan pengakuan potensi dan kemampuan masyarakat dalam menata kehidupan ekonominya. Oleh karenanya, diperlukan pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), dan bukan pembangunan yang berorientasi pada akumulasi kapital yang hanya menguntungkan kaum minoritas namun mengesampingkan nilai-nilai tradisi lokal budaya Jawa.

Pembangunan harus memperhatikan eksekusi yang akan ditimbulkan, baik eksekusi positif maupun negatif, berkaitan dengan tujuan pribadi dan tujuan masyarakat. Tujuan personal diartikan sebagai orientasi pasar dan

¹⁵ Kehidupan psikis kolektif timbul dari interaksi sosial. Interaksi sosial ini dapat begitu intens dan hebat sehingga ideal-ideal baru dapat timbul darinya. Ideal-ideal ini dinamis karena di belakangnya terdapat kekuatan-kekuatan nyata dan aktif yang dapat disamakan dengan kekuatan-kekuatan lain yang bergerak di dalam alam semesta (L. Laeyendecker, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan; Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991) P.301

¹⁶ Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Darmosugito (92 tahun), pada saat kami wawancara, “*kulo sadean teng mriki inggih namung di dhamel hiburan mas, amergi teng griyo nganggur*” (saya berjualan disini hanya sekedar hiburan mas, karena di rumah menganggur). (wawancara, 26/03/2007). Fenomena ini tentunya hanyalah salah satu dari ratusan penjual yang ada di pasar tradisional tersebut.

¹⁷ Lihat, Goerge Ritzer, *Classical Sociological Theory*, (Library of congress Cataloging in Publication data, 2000) P. 451-453. Bandingkan dengan, Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta, Kencana, 2004) P. 121-136

pengerukan keuntungan semata, sedangkan tujuan sosial diartikan sebagai upaya transformatif terhadap totalisasi sistem yang meliputi aspek sosial, budaya, agama, tradisi dan ekonomi. Dari sinilah kita akan mengetahui bahwa transformasi sosial tidak “berjalan pincang”, yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan bahkan dikorbankan.¹⁸ Keselaran sosial membutuhkan spirit pembangunan yang integratif dengan nilai egalitarianisme. Meningkatkan kesejahteraan *Wong cilik* yang sudah biasa terpinggirkan dengan sistem yang tidak humanis. Maka, negara dalam hal ini mempunyai peran yang amat signifikan, meski dalam prosesnya, negara dan pasar selalu berebut kekuasaan atas dominasi sistem sosial yang sudah dibangun dalam masyarakat tertentu, dan pasar selalu berpijak pada logika kecepatan memproduksi dan inovasi barang-barang untuk dikonsumsi.¹⁹ Sebagaimana diungkapkan oleh Charles Lindblom (1977)*the operation of parlements and legislatives bodies, bureaucraties, parties, and interest groups depends in large part on the degree to which government replaces market or market replace government.....*²⁰

Tak bisa dipungkiri bahwa, dalam sistem ekonomi kapitalis selalu mengandalkan kecepatan. Kapitalisme global tahap lanjut saat ini nafas hidupnya menggunakan dromologi (ilmu percepatan), baik dari cara memproduksi maupun mengkonsumsi. Bahkan lebih dari itu, sistem perekonomian modern lebih cepat dari pikiran manusia, karena didukung oleh teknologi yang canggih.²¹ Maka, kecepatan ekonomi kapitalis ini juga

¹⁸ Di bidang ekonomi saja terdapat beberapa teori tentang “pertumbuhan seimbang” (*balanced growth*) sebagai tandingan teori-teori “pertumbuhan tidak seimbang” (*unbalanced growth*). Teori yang pertama mendorong pertumbuhan keseluruhan ekonomi, sedangkan yang kedua memusatkan perhatian pada sektor-sektor perekonomian yang paling dinamis dan mengandalkan akibat-akibat pertumbuhan sektor-sektor yang dinamis itu yang akhirnya akan mempengaruhi sektor-sektor lain (*multiplayer effects*) (Lihat, Peter L. Berber, *Piramida Kurban Manusia; Etika Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta, LP3ES, 2004) P. 40-41

¹⁹ Perubahan yang berlangsung begitu cepat menuntut setiap orang memperbaharui ketrampilannya secara terus-menerus setiap waktu, agar terus bisa bekerja, terus bisa berbisnis, terus bisa berkarya, dan terus bisa mengkonsumsi. Untuk banyak orang, seperti pebisnis dan konsumen, makna kecepatan tak lain adalah keterhubungan (*connectivity*) (Lihat, *Yasraf Amir Piliang, Dunia Yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan* (Yogyakarta, Jalasutra, 2004) P. 65

²⁰ Charles Lindblom E., *Politics and Markets; the Worl's Political Economic Systems*, (New York, Basic Book, Inc., Publishers, 1977) hal. ix

²¹ *Yasraf Amir Piliang, Dunia Yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, (Yogyakarta, Jalasutra, 2004) hlm.66.

mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat secara lebih cepat. Artinya, transformasi sosial seperti gaya hidup, perilaku sosial, konsumerisme, bahkan juga sikap westernisasi terus mengalami perubahan yang dinamis. Ini terjadi pada seluruh elemen masyarakat, bahkan sampai dengan masyarakat yang menamakan dirinya sebagai kelompok intelektual di dunia akademik. Mereka semua didorong untuk meningkatkan hasrat mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi secara cepat dengan iklan yang menggiurkan dan membayangkan kemewahan kehidupan dunia.

III. Mal dan Perubahan sosial

Pembangunan berarti perubahan ke arah yang lebih baik.²² Oleh karenanya, hadirnya beberapa *Shopping Mall* juga dimaknai sebagai realisasi dari pembangunan di Yogyakarta oleh beberapa kalangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, terlepas dari Pro dan kontra, pembangunan tidak seharusnya mengesampingkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang secara turun-temurun sudah dilestarikan nenek moyang kita. Pembangunan bukanlah Eropanisasi atau Amirikanisasi. Namun pembangunan adalah bagaimana mengoptimalkan potensi daerah dengan tidak mengesampingkan *local knowledge*, tidak memberangus situs-situs bersejarah yang dinilai mempunyai keistimewaan tersendiri (*heritage*), dan yang tidak kalah penting adalah terus melestarikan dan meningkatkan perekonomian tradisional, bukan malah mematakannya (marginalisasi).²³

Padahal pasar tradisional juga cukup banyak menyerap tenaga kerja. Hal yang tidak kalah penting adalah eksistensi pasar tradisional juga mampu berperan untuk meminimalisir merebaknya budaya konsumerisme di masyarakat, terutama generasi muda. Di mana orientasi tersebut sangat berbeda dengan keberadaan mal-mal dengan daya tarik tersendiri untuk mempengaruhi seseorang agar berbelanja, namun tidak banyak menyerap tenaga kerja, karena spesialisasi yang tinggi. Ini tentu searus dengan problematika yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, karena tingkat

²² Arief Budiman dan Ph. Quarles van Ufford (editor), *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan; Birokrasi-Birokrasi Dalam Pembangunan* (Jakarta, PT. Gramedia, 1988) Hlm.7

²³ Provinsi DIY yang dinyatakan memiliki status keistimewaan tidak saja di dukung oleh fakta historis tetapi juga telah dikuuhkan dengan undang-undang seperti UUD'45 pasal 18 beserta amandemennya pasal 18 B, UU pemerintah daerah No. 3/50,5/74,22/99. Dalam draft RUU keistimewaan DIY ditegaskan HB X dan PA IX otomatis menjabat sebagai gubernur dan wakilnya (Bab VII pasal 17). (Lihat, Akhmad Rifa'i, dkk, *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, (Yogyakarta, CCSS dan Forum Bulaksumur *School of Thought*, 2002) P. 65

pengangguran yang semakin tinggi, akibat sulitnya mencari lapangan kerja, dan mengakibatkan kriminalitas cenderung meningkat. Dalam hal ini, pemerintah pun tidak mampu memberikan solusi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang menjadi persoalan serius bagi bangsa ini. Pada tahun 2004 penduduk miskin di Jawa dan Bali mencapai 20,71 juta atau 15,73%, sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 0,6 juta jiwa atau 19,14% dari total seluruh penduduk yang ada.²⁴

Secara ideal pembangunan harus mampu mengurangi angka kemiskinan yang terus mengalami peningkatan. Dalam situasi ini, bangsa Indonesia dihadapkan oleh beberapa fenomena yang menurut penulis sangat memilukan hati. Di Gunung Kidul misalkan, masih banyak ditemukan keluarga pra sejahtera. Tak hanya itu, balita yang menderita gizi buruk ke empat kabupaten—termasuk kota Yogyakarta juga cukup tinggi. Berturut-turut jumlah bayi yang menderita gizi buruk di kota Yogyakarta mencapai 538 anak, kabupaten Sleman 524 anak, kabupaten Gunung Kidul, 512 anak kabupaten Kulon Progo, 356 anak dan kabupaten Bantul, 297 anak. Jadi jumlah keseluruhan balita yang menderita gizi buruk di DIY pada tahun adalah 2.227 anak dari total seluruh balita 160.223 anak.²⁵ Persoalan ini juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan, tidak hanya melalui mengejar peningkatan ekonomi, tetapi kesejahteraan masyarakat menurut hemat penulis jauh sangat penting. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan bekal *skills* yang memadai melalui training dan pelatihan-pelatihan, maupun memberikan pinjaman tanpa harus mengembalikan imbalan jasa. Singkatnya industrialisasi ekonomi kerakyatan menjadi sebuah jawaban, dengan berpijak pada keseimbangan (*balancing*).²⁶

Pemerintah seharusnya memberikan porsi yang seimbang (*balancing space*) dalam membangun sistem perekonomian masyarakat Yogyakarta. Karena masih banyaknya tenaga kerja yang tidak dibekali dengan kemampuan yang tidak memadai (*unskills labour*) mengharuskan penyediaan lapangan kerja dengan diferensiasi yang tidak terlalu ketat. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu modal sosial (*social capital*) untuk menghasilkan pekerja yang terampil (*skills labour*). SDM yang

²⁴ Badan Pusat Statistik, tahun 2005

²⁵ *Harian Kompas Yogyakarta*, 22 Nopember 2005

²⁶ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).P. 143.

handal—meskipun pelan-pelan tapi pasti—akan mengeluarkan kita dari ketergantungan dengan negara-negara adidaya maupun investor asing di Indonesia. Agenda tersebut harus dimulai sejak dini, dengan bangunan komitmen di seluruh *stakeholder* pemerintah pusat dan lokal. Selain itu, proyek-proyek yang berorientasi padat karya (*full employment*) harus lebih banyak dibuka, ketimbang proyek yang berorientasi padat modal (*full capital*) hal ini ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran. Secara garis besar pencari kerja di Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II:
Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi DIY Desember 2004 & September 2005

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja	
	Des. 2004	Sep. 2005
Tidak tamat SD	5	8
SD	274	812
SLTP	2.833	4.636
SLTA	36.589	55.429
D-1/D-2/D-3	9.606	19.198
S-1	30.670	45.020
S-2	485	745

Sumber: Disnakertrans DIY, dalam KOMPAS, 14/02/2006

Tabel di atas menunjukkan bahwa, lulusan SLTA, dalam pencarian kerja, menduduki peringkat yang paling tinggi, 36.589 orang tahun 2004 dan mengalami peningkatan 55.429 orang, pada tahun 2005. Kondisi ini diperparah dengan “pengangguran intelektual”,²⁷ tingkat Strata 1 (S1), 30.670 orang, dan meningkat tajam pada tahun 2005 yaitu, 45.020 orang. Yang menjadi pertanyaan kemudian apakah sistem yang tidak mendukung, atau ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dengan lapangan kerja, sehingga pengangguran terus mengalami peningkatan?. Persoalan inilah

²⁷ Penulis menyebutnya dengan istilah pengangguran intelektual, didasarkan pada tingkat pendidikan yang cukup tinggi, namun masih tergolong sebagai pengangguran.

yang sampai sekarang terus menjadi perdebatan. Sebagai jalan tengah, dunia pendidikan harus membekali para siswanya dengan kemampuan yang memadai untuk membuka lapangan kerja, atau paling tidak memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan setelah menyelesaikan studinya. Jika ditelusuri lebih jauh, dunia pendidikan kita hanya mampu mencetak generasi yang bermental pragmatis dan miskin akan kreativitas. Sehingga para lulusan sekolah maupun perguruan tinggi lebih mengutamakan mencari lapangan kerja dibandingkan dengan menciptakan lapangan kerja. Lebih senang menginduk kepada industri atau perusahaan besar, daripada memulai dari hal yang kecil di dunia usaha. Bahkan pembangunan di Indonesia pun tidak jauh dari teori tersebut. Bergantung pada lembaga-lembaga donor internasional yang represif.

Kita sebenarnya telah terdistorsi dengan pola pikir yang tergantung kepada kekuatan yang besar pada ranah pengembangan sektor ekonomi, dan berharap banyak akan janji-janji globalisasi ekonomi. Searus dengan itu, Dos Santos (1970), mengatakan negara pinggiran atau *periferi* bisa juga berkembang, meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang tergantung, perkembangan ikutan. Impuls dan dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara *periferi*, tetapi dari negara induknya.²⁸ Dalam realitasnya apa yang digagas oleh Dos Santos tidak selalu berjalan demikian, pada level yang lebih mikro hadirnya Carrefour maupun *Shopping Mall* secara keseluruhan telah memarginalisasi pasar tradisional.²⁹ Namun pada sisi lain juga meningkatkan budaya konsumerisme. Masyarakat selalu didorong untuk mengkonsumsi produk-produk baru secara cepat dan terus mengikuti perkembangan, karena iklan yang amat menggiurkan

Singkatnya, globalisasi ekonomi telah mendorong masyarakat menganut perilaku konsumtif, tetapi tidak produktif. Inilah salah satu ciri masyarakat di dunia ketiga. Berbeda dengan masyarakat industri, meskipun tingkat konsumtifnya tinggi, tetapi mereka juga produktif. Di samping kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang diberikan oleh negara-negara dunia

²⁸ Lihat, Arief Budiman, *Teori Ketergantungan Dunia Ketiga*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000) P. 69

²⁹ Dalam sebuah percakapan seorang penjual di pasar tradisional tersebut mengatakan bahwa pasca dibukanya Carrefour pasar Gowok semakin sepi dari pengunjung, terutama kalau hari-hari libur—seperti hari Minggu—para pelanggan lebih memilih berbelanja di *Mal* tersebut. Akhirnya penghasilannya juga mengalami penurunan yang berarti. Informan yang lain mengatakan ada dan tidak adanya Carrefour juga sama saja mas, pasar tetap seperti ini. Saya tidak begitu peduli, yang penting saya masih bisa bekerja. (interview, 26/03/2007)

pertama juga sangat tinggi. Maka, dalam hal ini negara harus memberikan jaminan sosial kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Kita sudah 'gerah' dengan jargon modernisasi ekonomi namun dalam kenyataannya justru mengesampingkan nasib rakyat kecil. Dalam realitasnya, mereka yang mempunyai kapital ekonomi bahkan masyarakat secara keseluruhan selalu didorong untuk mengkonsumsi produk-produk baru yang selalu ada di mal maupun supermarket serta mendorong perubahan gaya hidup (*life style*) yang dianggap lebih modern karena berkiblat ke Barat.

IV. Simpulan

Dalam masyarakat transisional, kehadiran *Shopping Mall* sebagai representasi ekonomi kapitalis mampu mendorong terciptanya perubahan sosial, seperti merebaknya budaya konsumerisme, perubahan perilaku sosial, mode berpakaian dan gaya hidup. Terutama di kalangan usia muda, di mana budaya pop (*pop culture*) menjadi *trand* yang berkiblat pada Barat. Di samping itu juga terdapat kemudahan-kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik material maupun non material. Faktor kebutuhan rekreatif mampu menjadi dasar bagi hasrat untuk berbelanja di *Shopping Mall*. Oleh karenanya, mengkonsumsi barang tidak hanya didasarkan pada logika kebutuhan semata, akan tetapi juga ranah emosi seseorang.

Tak bisa dipungkiri bahwa, dengan hadirnya *Shopping Mall* masyarakat selalu didorong untuk mengikuti perkembangan produk-produk secara cepat yang diproduksi dengan cepat pula. Iklan yang didesain secara menarik mempunyai kekuatan magnetik untuk menyedot perhatian masyarakat agar mengkonsumsi produk-produk baru. Di sisi lain, penyediaan fasilitas-fasilitas tertentu diyakini juga mampu menyedot pengunjung lebih banyak lagi dan membelanjakan uangnya untuk kepentingan konsumtif. Pada ranah yang lain, image yang dibangun dalam masyarakat menegaskan bahwa belanja di *Shopping Mall* dapat menegaskan status sosial ekonomi seseorang dan merupakan prestasi sosial (*social prestige*). Orang akan semakin bangga jika mampu membeli barang-barang bermerk yang tidak bisa dibeli oleh orang lain, karena harganya yang mahal atau persediaan terbatas (*limited edition*). Singkatnya, belanja menjadi bagian dari gaya hidup seseorang, bukan lagi sekedar logika kebutuhan.

Eksistensi *Shopping Mall* telah mendorong budaya konsumtif di kalangan masyarakat yang dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern dan berkiblat pada Barat. Ironisnya, situasi tersebut secara sistematis menggeser

nilai-nilai tradisi sebagai identitas dalam percaturan global. Berawal dari situlah maka, upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya budaya konsumtif dalam masyarakat tidak bisa ditawar lagi. Selama ini kita telah salah kaprah dalam memaknai modernitas yang berkiblat pada Barat, namun hanya sebatas simbol-simbol saja, sedangkan dari sisi substantif masih jauh dari harapan. Akhirnya simbolisme-simbolisme tersebut menjadi belenggu bagi kehidupan sosial.

Pada sisi lain, dalam era percaturan global, revitalisasi kebudayaan lokal sebagai penegasan identitas agar tidak tercerabut dari akar khazanah budaya bangsa menjadi amat penting. Karena, saat ini generasi muda lebih terkonsentrasi secara sistemik untuk mengikuti budaya yang sedang *trand*. Disinilah arti penting revitalisasi kebudayaan lokal sebagai suatu gerakan di era global untuk menegaskan identitas dan membangun bangsa yang berkarakter. *Wallâhu a'lam bisowâb*.

Daftar Pustaka

- Rifa'i, Akhmad dkk., *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: CCSS dan Forum Bulaksumur School of Thought. 2002.
- Anderson, Benedict R.O'G, *Language and Power; Exploring Political Cultures in Indonesia*, Cornell University Press, 1990.
- Baudrillard, Jean, *Masyarakat Konsumsi*, Yogyakarta: Kreasi wacana, 2004.
- Berger, Peter L., *Revolusi Kapitalis*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- , *Piramida Kurban Manusia; Etika Politik dan Perubahan Sosial* Jakarta: LP3ES, 2004.
- Boeke, *Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda*, dalam, Sajogyo, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hardiman, F.Budi, *Manuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Karl Marx, *Kapital*, Jakarta: Hasta Mitra, 2004.
- Laeyendecker, L. Tata, *Perubahan dan Ketimpangan; Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Lash, Scott, *Sosiologi Post Modernisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Lindblom, Charles E., *Politics and Markets; the Worl's Political Economic*

Systems, New York: Basic Book, Inc., Publishers, 1977.

Nugroho Heru, Dr, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ritzer, Goerge, *Classical Sociological Theory*, Library of congress Cataloging in Publication Data, 2000.

Ritzer, Goerge dan Goodman, Douglas J., 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ritzer, Goerge, *Teori Sosial Postmodernisme*, Yogyakarta: Kreasi wacana, 2005.

Sumawinata, Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa; Sebuah Analisa falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sztompka, Piötr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2005.

Wibowo I. *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.

Piliang, Yasraf Amir, *Dunia Yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

Non Buku

Kompas Jogja, 15/06/2007 dan 22/11/2005

* **M. Imam Zamroni, M.Si.** Lahir di Tuban, 06 Oktober 1982. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian menempuh program master di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan konsentrasi pada jurusan Sosiologi.